

Transformasi Identitas Sosial Perempuan Tionghoa Indonesia Dari Komunikasi Sosial Ke Komunikasi Politik

Rudi Salam Sinaga¹, Puji Lestari², Khairunnisah Lubis³, Agnita Yolanda⁴

¹Universitas Medan Area, Kota Medan-Indonesia.

²Universitas Negeri Semarang.

³Universitas Medan Area, Kota Medan-Indonesia.

⁴Universitas Medan Area, Kota Medan-Indonesia.

Email korespondensi: rudisalam@staff.uma.ac.id, pujilestari@staff.unnes.ac.id, khairunnisah@staff.uma.ac.id, agnitayolanda@staff.uma.ac.id

Abstrak

Transformasi identitas sosial pada setiap ruang dan waktu memiliki penyebab tersendiri dalam perubahannya. Tulisan ini ingin mendapatkan pada keadaan seperti apa komunikasi sosial bergerak menjadi komunikasi politik di kalangan perempuan Tionghoa Indonesia. Tulisan ini membahas perjalanan sejarah pada empat era (pra-kemerdekaan, orde baru, reformasi dan pasca-reformasi) untuk merefleksikan keadaan tersebut. Penelitian kualitatif ditetapkan sebagai jenis penelitian dalam tulisan ini karena berkaitan dengan interaksi, perubahan dan proses pada kurun waktu tertentu. Studi pustaka dianggap jenis penelitian kualitatif yang relevan digunakan untuk mendapatkan informasi. Data berasal dari telaah buku, artikel dan laporan penelitian yang relevan terhadap fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi kemudian dilakukan interpretasi untuk mendapatkan makna. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pergeseran komunikasi sosial ke komunikasi politik terjadi untuk merespon keadaan tertentu dalam rangka adaptasi dan mengakomodasi perubahan jaman.

Kata kunci: Komunikasi sosial, Komunikasi politik, Perempuan, Tionghoa

Abstract

The transformation of social identity in every space and time has its own causes in the changes. This paper wants to find out in what circumstances social communication moves into political communication among Indonesian Chinese women. This paper tries to summarize the history of the four eras (pre-independence, new order, reformation and post-reformation) to reflect this situation. Qualitative research is defined as a type of research in this paper because it deals with interactions, changes and processes over a certain period of time. Literature study is considered a relevant type of qualitative research used to obtain information. The data comes from a review of books, articles and research reports that are relevant to the research focus. The data obtained is then verified and then interpreted to get meaning. The results of the study found that the shift from social communication to political communication occurred to respond to certain circumstances in order to adapt and accommodate changing times.

Keywords: Social communication, Political communication, Women, Chinese

Pendahuluan

Transformasi identitas sosial bergerak melalui tindakan sadar yang dilakukan sejumlah aktor dalam merespon perkembangan jaman. Identitas sosial tumbuh dan berkembang dalam setiap segmentasi komunitas masyarakat dengan identitas sosial masing-masing. Identitas sosial berasal dari tradisi budaya yang memuat seperangkat nilai-nilai penting dalam membentuk perilaku dan cara pandang komunitas masyarakat. Sejumlah teori mengklaim

identitas sosial mampu melalui ujian yang diberikan oleh perubahan jaman. Keberadaan identitas sosial saat ini juga menjadi “alat” penting untuk mengantisipasi pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan tradisi budaya dalam identitas sosial. Hal yang menarik untuk di eksplorasi ialah ketika identitas sosial menempatkan kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu rumah tangga maka bagaimana dengan kehadiran aktor-aktor pahlawan dari kaum perempuan di Indonesia atau bahkan di dunia. Transformasi identitas sosial dari sebelumnya fokus pada ranah wilayah sosial kemudian bergerak ke ranah wilayah politik menunjukkan terdapat suatu keadaan yang membuat kaum perempuan mengambil peran yang berbeda.

Sejumlah penelitian telah memperlihatkan terdapat peran kaum perempuan dalam proses transformasi sosial. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari karya Cline (2010); Osten (2010); Alonso et al. (2011). Kebanyakan transformasi sosial berujung pada kemunculan era baru yang menghormati kebebasan berpendapat yang dikenal dengan demokrasi. Peran kaum perempuan yang melakukan transformasi sosial memberikan dampak pada bidang politik terlihat dengan membaca disertasi dari IT (2005) melalui organisasi keagamaan. Disertasi Kim (1991) dan Tesis dari Rudikof (1994) dari organisasi mahasiswa. Tulisan Murray (2016) mengenai peran kaum perempuan dalam memperhatikan keterwakilan politik. Kemudian terdapat artikel yang di tulis Massoumi (2015) mengeksplorasi gerakan politik kaum perempuan dalam segmentasi agama dalam merespon isu peperangan di dunia. Pembelahan di antara transformasi sosial dan transformasi politik terletak pada tujuan dari aktivitas. Bila berkaitan dengan struktur politik dan kebijakan maka di sini pembatasan dari transformasi sosial. Transformasi sosial lebih mengarah pada nilai dari norma dan budaya.

Dalam konteks kaum perempuan pada segmentasi etnis minoritas untuk melakukan transformasi sosial tentu bukan perkara yang mudah. Komunikasi sosial yang berubah kepada komunikasi politik tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Studi ini akan mengeksplorasi peran kaum perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pada empat era (pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan pasca reformasi). Komunikasi sosial dan komunikasi politik seperti apa yang mereka mainkan dan apa isu yang mereka perjuangkan. Teori komunikasi digunakan sebagai teori utama untuk melihat basis nilai yang melekat pada kaum perempuan Tionghoa. Teori komunikasi politik digunakan sebagai teori pendukung dalam merefleksikan tindakan yang dilakukan kaum perempuan Tionghoa.

Metode Penelitian

Tulisan ini berkaitan untuk mengelaborasi suatu interaksi dan proses dalam lingkungan sosial sehingga jenis penelitian kualitatif dianggap relevan untuk diterapkan (lihat Creswell, 2014; Miles & Huberman, 1984; Neuman, 1997). Dengan mempertimbangkan fokus dan lokus penelitian ini pada kurun waktu yang telah berlalu maka penelitian kualitatif ini menggunakan jenis studi pustaka. Data didapatkan melalui telaah buku, hasil penelitian, artikel. Sejumlah data yang berhasil didapatkan di validasi dengan data yang lain untuk kemudian diberikan interpretasi. Kunci penting dalam penelitian kualitatif ialah kemampuan untuk membaca makna yang bersumber dari berbagai data kemudian menghasilkan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kiprah Perempuan Tionghoa di Indonesia

Ishardanti (2011) dalam tesis yang ditulisnya mencatat istilah yang digunakan untuk menyebutkan etnik keturunan Cina terbagi pada 2 yaitu: 1) peranakan dan 2). Cina. Peranakan menurut Ishardanti (2011: 33) adalah etnik Cina yang lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia. Peranakan lebih populer dengan sebutan Tionghoa. Di masa pra-kemerdekaan kiprah perempuan Tionghoa terpotret dalam tulisan Wirawan (2013: 70) yang menguraikan terdapat perkumpulan kaum perempuan Tionghoa sekitar tahun 1929 di Makasar. Tidak sedikit dari kaum perempuan ini mengambil peran sebagai penulis dan jurnalis di surat kabar. Melalui nama samaran mereka mencurahkan suasana pikiran mereka melalui tulisan. Kiprah yang dilakukan perempuan Tionghoa sebagaimana yang diuraikan di atas secara umum tidak ada yang berbeda dengan kaum perempuan dari etnik lainnya. Situasi keadaan telah membentuk manusia untuk melakukan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan. Catatan yang diberikan Wirawan (2013) di atas merefleksikan apa yang semestinya dilakukan manusia untuk mendapat perhatian ataupun memperoleh kepentingan yang dianggap mendesak.

Persepsi umum yang berkembang di kalangan masyarakat awam dalam memandang sosok figur perempuan Tionghoa tertuju pada rutinitas pekerjaan rumah tangga. Persepsi umum ini berlaku sama dengan perempuan dari etnis lainnya di Indonesia. Persepsi ini tidak dapat di generalisasi karena akan berbeda menurut kondisi dan waktu yang sedang terjadi. Membaca tulisan (Kwartanada, 2017) yang mengulas peran perempuan Tionghoa di masa kependudukan Belanda di Indonesia menampilkan upaya-upaya dari kaum perempuan Tionghoa untuk mengejar kesetaraan. Pada masa itu kesetaraan yang ingin di raih kaum perempuan Tionghoa adalah kesejajaran dengan peradaban kehidupan bangsa Belanda di Indonesia. Melalui beragam aktivitas kaum perempuan Tionghoa mencoba membuka ruang publik untuk

mengekspresikan kebebasan dan kesetaraan melalui beragam bentuk aktivitas seperti bermain musik genre eropa, menulis di surat kabar dan mengakses pendidikan formal di sekolah bentukan Belanda. Situasi ini amat dramatis dan dilema bagi perempuan Tionghoa karena aktivitas tersebut terjadi di tengah kebijakan Belanda yang memperlakukan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan etnis lokal di akhir abad ke-19. Perempuan Tionghoa yang melakukan peran ini menurut (Kwartanada, 2017) berasal dari kaum bangsawan Tionghoa.

Tahun 1998 menjelang jatuhnya rezim pemerintahan orde baru sejumlah pergerakan massa melakukan aksi. Terdapat massa yang fokus pada aksi politik dan tidak sedikit pula sebagian masa lainnya pada waktu dan tempat yang berbeda mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan kerusuhan. Arisetya (2015) mencatat salah satu korban kekerasan dan asusila pada saat kerusuhan ialah kaum perempuan Tionghoa. Berkaitan dengan pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang dialami kaum laki-laki maupun kaum perempuan Tionghoa di tahun 1998 Paramita (2014) meyakini pengalaman tersebut memengaruhi pola hidup dan bersosialisasi. Penilaian ini dapat dikatakan mengarah pada sikap kehati-hatian atau waspada dalam melakukan interaksi dan komunikasi terhadap lingkungan eksternal. Kehati-hatian ini lebih tertuju untuk memperoleh rasa kenyamanan untuk menghindari kesalahpahaman dan dampak buruk yang ditimbulkan dari kesalahpahaman tersebut. Umumnya suatu komunitas di negara manapun yang pernah merasakan diskriminasi hingga kekerasan tentu tidak akan berharap untuk kedua kalinya mengalami hal yang sama. Trauma akibat kekerasan akan secara alami membatasi diri atau meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi.

Kiprah perempuan Tionghoa di Indonesia secara garis besar sama dengan karakteristik perempuan etnik lainnya di Indonesia. Aktivitas sosial terpusat pada keluarga dan rumah tangga dan memberikan ruang waktu untuk mencari pendapatan keluarga. Aktivitas politik hanya akan terjadi pada beberapa kaum perempuan yang memiliki kemauan tinggi terhadap dunia politik bukan hanya bagi kaum perempuan etnik Tionghoa namun juga bagi kaum perempuan etnik lainnya.

Komunikasi Sosial ke Komunikasi Politik

Komunikasi sosial memberikan tekanan perhatian pada aktivitas interaksi individu terhadap lingkungan disekitarnya. Interaksi ini memperhatikan struktur nilai atau norma yang telah diakui bersama. Dasar utama komunikasi sosial adalah pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Dengan demikian interaksi sosial berjalan secara seimbang diantara individu dan lingkungannya karena bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan hidup dan interaksi.

Situasi ini diwujudkan kaum perempuan Tionghoa di masa pra-kemerdekaan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kebutuhan untuk berinteraksi dan bertahan hidup di aplikasikan melalui berbagai aktivitas seperti kesenian, jurnalis dan dagang. Suasana komunikasi sosial akan menguat bila lingkungan dipenuhi dengan muatan pesan-pesan sosial. Lingkungan sosial akan menjadi “kaku” ketika muatan pesan politik mendominasi komunikasi sosial.

Penekanan komunikasi politik terarah pada pesan yang bermuatan politik seperti pada kaitannya dengan kebijakan negara, pemilihan umum dan organisasi politik. Pada era orde baru transformasi identitas sosial kaum perempuan Tionghoa masih berada pada aktivitas komunikasi sosial. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kesenian pada lingkungan yang terbatas. Peningkatan komunikasi politik kaum perempuan Tionghoa meningkat ketika memasuki era reformasi hingga pasca-reformasi. Keadaan ini terjadi karena keterbukaan untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan politik telah terbuka di Indonesia. Era orde baru yang sentralistik dan cenderung otoriter digantikan dengan era reformasi dengan nilai-nilai demokrasi yang diusung. Perubahan era ini secara perlahan mengundang keikutsertaan setiap segmentasi etnik untuk terlibat pada berbagai bidang kehidupan bernegara termasuk pada arena pemilu.

Era pasca-reformasi undang-undang pemilu mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30 persen partisipasi perempuan menjadi calon legislatif (Caleg) dalam daftar Caleg di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Era ini sekaligus membawa berbagai ilmuwan politik untuk membuat kajian. Kajian empiris mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam arena politik elektoral untuk berkarir di jabatan legislatif telah dikaji dari aspek keterwakilan jumlah perempuan di legislatif (Mukarom, 2008), dilema keterwakilan perempuan (Azis, 2013), rekrutmen Caleg perempuan di partai (Afrianty, 2015), kinerja legislatif perempuan (Andriana et al., 2012) namun kajian yang memfokuskan pada keterlibatan kaum perempuan dari etnis minoritas yaitu etnis Cina masih tergolong langka satu-satunya kajian yang berhasil ditemukan berasal dari kajian yang dilakukan Sweinstani & Mariyah (2017) mengenai rekrutmen Caleg perempuan dari etnis Cina di Kota Semarang dengan posisi studi mengeksplorasi proses rekrutmen dan alasan partai untuk mengakomodasi Caleg perempuan dari etnis Cina.

Studi ini mengambil posisi untuk mengisi celah-celah kekosongan dari penelitian sebelumnya yang belum pernah dilakukan yaitu mengeksplorasi keterlibatan perempuan etnis Cina menjadi Caleg dari perspektif sistem budaya etnis Cina, sistem Pemilu dan realitas perilaku pemilih di Dapil. Kontribusi yang diberikan dalam studi ini adalah suatu konsep kerangka

analisis yang menjelaskan transformasi identitas gender kaum perempuan etnis Cina dalam perspektif pertemuan sistem budaya terhadap sistem politik serta realitas perilaku pemilih di Dapil.

Sistem pemilu demokrasi yang terbuka di era reformasi dan pasca-reformasi satu sisi telah memberikan keterbukaan kepada siapa saja untuk dapat mengakses jabatan politik melalui pemilu. Pada sisi lainnya melahirkan masalah seperti tingginya biaya politik di pemilu dan sistem rekrutmen caleg yang cenderung tertutup. Sweinstani & Mariyah (2017: 1170-1171) dalam studi yang dilakukan di Kota Semarang terhadap rekrutmen Caleg perempuan dari etnis Cina dilakukan partai politik atas beberapa alasan diantaranya terdapat kecenderungan kaum perempuan etnis Cina memiliki kekuatan finansial yang lebih dari kaum perempuan pada etnis lainnya. Asumsi ini didasarkan pada profesi kaum perempuan etnis Cina kebanyakan bekerja sebagai pengusaha baik itu secara individu maupun melibatkan suami atau keluarga.

Tabel 1.

Legislatif Perempuan Pada Pemilu era Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi

Pemilu	Jumlah	Persentase
1950-1955 (DPR Sementara)	8	3,8
1955-1960	17	6,3
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1
1971-1977	36	
1977-1982	29	7,8
1982-1987	39	6,3
1987-1992	65	8,5
1992-1997	62	13
1997-1999	54	12,5
1999-2004	46	10,8
2004-2009	65	9
2009-2014	99	11,7
2014-2019	97	17,3

Sumber: Statistik Politik 2014.
Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014: 65)

Tabel di atas menunjukkan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan jabatan legislatif di pemilu yang pernah dilaksanakan. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan dua hal yaitu: 1) pendidikan politik pada segmentasi kaum perempuan telah berjalan di internal partai politik dan 2) Undang-undang pemilu telah mendorong kearah peningkatan partisipasi politik kaum perempuan di pemilu. Hal lainnya yang membuat belum terjadinya lompatan peningkatan jumlah yang secara signifikan dapat disebabkan oleh pertarungan yang ketat antara setiap caleg (laki-laki dan perempuan) dan tingginya biaya

politik yang diperlukan caleg untuk membangun komunikasi politik bersama konstituen dapil (lihat Harjanto, 2010; Thurber, 1974; Adiputri, 2015).

Luas dapil dan ragam segmentasi konstituen sebagai tantangan bagi setiap caleg untuk mendapatkan suara terbanyak. Waktu operasional untuk mengoperasikan aktivitas-aktivitas rapat dan kampanye politik pada akhirnya cenderung menjadi kendala bagi caleg kaum perempuan. Pada akhirnya menjadi masalah serius bagi partai untuk memenuhi kuota caleg perempuan (lihat Hughes, 2011; Sinaga et al., 2018). Tidak hanya bagi perempuan etnik Tionghoa bagi perempuan etnik lainnya kendala waktu dalam beraktivitas masih menjadi perhatian utama sebelum akan memutuskan masuk ke dalam dunia politik. Aktivitas dunia politik pada praktiknya cenderung berlangsung pada waktu jam berakhirnya pekerjaan utama di kantor. Setelah jam kantor berakhir biasanya digunakan untuk kegiatan rapat-rapat partai politik bahkan tidak jarang juga berlangsung di jam kerja kantor. Dengan demikian pilihan prioritas ialah pekerjaan di kantor yang merupakan sumber utama nafkah penghasilan. Dilema ini menjadi pilihan yang dipertimbangkan bagi kaum perempuan sebelum akan mengambil keputusan terlibat atau tidak di dunia politik.

Penutup

Transformasi identitas sosial dapat terjadi dan akan bergerak secara alamiah mengikuti kebutuhan komunitas dan perkembangan jaman. Aktivitas kaum perempuan Tionghoa pada era pra-kemerdekaan dengan beragam aktivitas sosial akan sama halnya dilakukan dengan kaum perempuan etnik lainnya. Kecenderungan adaptasi yang tinggi akan dilakukan pada lingkungan baru. Upaya untuk berkomunikasi dan bertahan hidup sebagai naluri dasar manusia untuk merespon lingkungannya. Komunikasi sosial yang bergeser kepada komunikasi politik akan terjadi bilamana keadaan menghendaki untuk mendapat respon. Respon yang diberikan ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan internal komunitas dan cenderung menjaga hubungan keseimbangan bersama lingkungan sekitar. Transformasi identitas sosial seperti ini menjadi sifat dasar manusia untuk beradaptasi dan mengakomodasi lingkungan.

Daftar Pustaka

- Adiputri, R. D. (2015). Political Culture in the Indonesian Parliament: Analyzing Parliamentary Debates on the Regional Parliaments 1999-2009. In *Dissertation*. University of Jyväskylä.
- Afrianty, I. (2015). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014. *Politeia*, 7(2), 64–73. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/view/16062>
- Alonso, S., Keane, J., Merkel, W., & Fotou, M. (Eds.). (2011). *The Future of Representative Democracy*. Cambridge University Press.
- Andriana, N., Siregar, S. N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiatri, A. P., & Amalia, L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f4cc8b75-fa78-c02b-c3ad-08fc9bc8d030&groupId=252038
- Arisetya, D. (2015). Persepsi Etnis Tionghoa Sebagai Kelompok Minoritas Terhadap Etnis Non-Tionghoa Dalam Politik Multikulturalisme (Studi Di Kelurahan Metro). In *Skripsi*. Universitas Laampung.
- Azis, A. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender*. Rangkang Education.
- Cline, D. P. (2010). Revolution and Reconciliation: The Student Interracial Ministry, Liberal Protestantism, and the Civil Rights Movement, 1960-1970 [University of North Carolina]. In *Dissertation*. <https://doi.org/10.1016/b978-012397720-5.50034-7>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Ed). Sage Publications.
- Harjanto, N. T. B. (2010). Political Party Survival: The Golongan Karya Party and Electoral Politics in Indonesia 1999-2009 [Northern Illinois University]. In *Dissertation*. <http://search.proquest.com/docview/851699861?accountid=13771>
- Hughes, M. M. (2011). Intersectionality, Quotas, and Minority Women's Political Representation Worldwide. *American Political Science Review*, 105(3), 604–620. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000293>
- Indonesia, B. P. S. R. (2014). *Statistik Politik 2014*.
- Ishardanti, R. (2011). *Identitas Hibrid Tionghoa: Studi Komunitas Cina-Banyumas*. Universitas Indonesia.
- IT, S. (2005). The Women's Movement In Indonesia: With Special Reference To The 'Aisyiyah Organization [The Temple University Graduate Board]. In *Dissertation*. <https://doi.org/10.1016/B978-012397720-5.50034-7>
- Kim, D. (1991). The Politics of the Korean Student Movement: Its Tradition, Evolution, and Uniqueness. In *Dissertation*. Arizona State University.
- Kwartanada, D. (2017). Bangsawan prampoewan. *Wacana*, 18(2), 422–454. <https://doi.org/10.17510/wacana.v18i2.591.Didi>

- Massoumi, N. (2015). 'The Muslim woman activist': Solidarity across difference in the movement against the 'War on Terror.' *Ethnicities*, 15(5), 715–741. <https://doi.org/10.1177/1468796814567786>
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications Inc.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2006.10.012>
- Murray, R. (2016). The Political Representation of Ethnic Minority Women in France. *Parliamentary Affairs*, 69(3), 586–602. <https://doi.org/10.1093/pa/gsv064>
- Neuman, L. . (1997). *Social Research Method: Qualitative & Quantitative Approach*. Allyn Bacon.
- Osten, S. (2010). Peace by Institutions: The Rise of Political Parties and The Making of The Modern Mexican State, 1920-1928. In *Disertation*. The University of Chicago.
- Paramita, S. (2014). Komunikasi Politik Dan Demokrasi Etnis Tionghoa Dalam Pemilu 2014. *Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi Politik, December 2014*.
- Rudikof, L. B. (1994). *Women in the Popular Front Student Peace Movement: Vassar College 1935-1941*. Sarah Lawrence College.
- Sinaga, R. S., Warella, Y., Yuwanto, Setiyono, B., Sardini, N. H., & Alfirdaus, L. K. (2018). Chinese Ethnic Competition in North Sumatera Electoral District 1: Case Study on the Regional House of Representative of North Sumatera Province Member Election , Indonesia 2014. *Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 6(11), 2080–2085. <https://doi.org/10.21276/sjahss.2018.6.11.5>
- Sweinstani, M. K. D., & Mariyah, C. (2017). Political Recruitment of Chinese-Indonesian Women Candidate: Study of PDI perjuangan's Recruitment in Semarang City Legislative Election 2014. *PEOPLE: International Journal of Social Science*, 3(2), 1156–1174. <https://doi.org/10.20319/pijss.2017.32.11561174>
- Thurber, J. A. (1974). Political Party Recruitment and Legislative Role Orientations [Indiana University]. In *Dissertation*. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Xerox+University+Microfilms+300#5>
- Wirawan, Y. (2013). Sejarah Pers Tionghoa Makassar hingga menjelang Perang Dunia ke-2. *Proceedings of International Conference on Chinese – Indonesians: Their Lives and Identities, Grand Candi Hotel, Semarang 14 -16 November 2013*, 53–73.